

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLI AGUSTA, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BURHANUDIN**

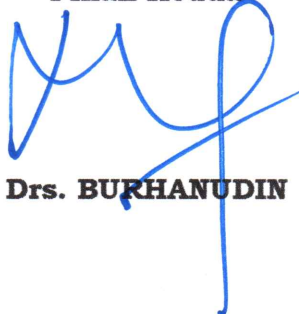
Jabatan : Bupati Belitung Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

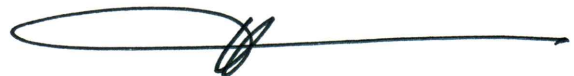
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja perubahan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja perubahan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perubahan tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perubahan dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Drs. BURHANUDIN

**Manggar, Nopember 2022
Pihak Pertama**



**HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19750821 200212 1 005**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	75,00 = C
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B > 60-70
		1.3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Persen	80,00
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Sedang
		2.2	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	Persen	83,40
		2.2	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	26
		2.3	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persen	25
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	83,33
		3.2	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	Persen	71,43
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	4.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	64,84
		4.2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	Persen	66,67
		4.3	Investor Baru yang Berinvestasi	investor	33
		4.4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	investor	59
5	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	5.1	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	242.849.110
		5.2	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	persen	5,80
		5.3	Persentase Data Informasi Industri Di SIINAS	persen	58,33
		6.1	PDRB sector perdagangan	Milyar Rupiah	548,96
		6.2	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persen	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
6	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	6.3	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	persen	3,79
		6.4	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	Produk	1
		6.5	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	72
		6.6	Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Persen	70

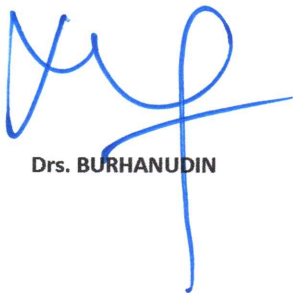
No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	5.282.350	5.280.100
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.879.543.000	4.627.326.428
		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.119.000	43.053.000
				1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.418.000	19.408.000
		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.120.000	19.120.000
				1.4.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	119.679.173	120.646.673
				1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.673.820	40.777.820
				1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.383.000	46.689.000
				1.4.5	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	72.891.570	72.669.570
				1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.360.000	5.880.000
				1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.228.000	7.014.000
				1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.396.000	622.090.000
		1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.137.020	151.589.520
		1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	186.040.000	186.300.000
				1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ari dan Listrik	182.720.000	174.320.000
				1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.537.500	359.117.700

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	275.388.500	329.562.500
				1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.500.000	86.978.000
				1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	33.100.000	28.300.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.799.700	6.799.700
		2.2	Pembuatan Peta Potensi Invetasi Kabupaten/Kota	2.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.093.000	35.093.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.1.1	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	130.187.500	130.187.500
				3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	111.316.000	90.204.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	230.179.500	222.619.500
				1.4.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	10.247.800	-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	113.518.000	127.787.500
				5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	195.323.000	236.932.000
				5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	168.134.500	112.256.000
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNon Perizinan yang Terintegrasi pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota	6.1.1	Pengolahan, Penyajiandan Pemanfaatan Datadan Informasi Perizinandan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40.140.000	40.425.600

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
7	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	7.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha TokoSwalayan	7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000	30.000.000
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	348.363.450	348.363.450
				8.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.802.132.460	1.980.536.460
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	9.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota	9.1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000	105.285.600
		9.2	Pengendalian Harga, dan Stok BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/Kota	9.2.1	Pemantauan Harga danStok Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	33.000.000	33.740.000
		9.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.3.1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.000.000	5.000.000
				9.3.2	Pengawasan PengadaanPupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.000.000	6.000.000
				9.3.3	Pengawasan Penyalurandan Penggunaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi	6.000.000	6.000.000
10	Program Pengembangan Ekspor	10.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.1.1	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000	20.000.000
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	11.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan	11.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang	168.499.730	252.891.734
				11.1.2	Pengawasan/PenyuluhanMe trologi Legal	24.999.950	24.999.950
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.1	Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan Industri Kabupaten/Kota	12.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	38.100.200	38.100.200
				12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	137.437.150	137.437.150

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
				12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.062.750	20.062.750
				12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.124.583.370	5.197.883.870
				12.1.5	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	42.899.800	42.899.800
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.349.800	10.349.800
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	14.1.1	Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	73.646.000	73.935.800
14 Program		23 Kegiatan		47 Sub Kegiatan		16.691.530.593	16.281.913.675

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN

Manggar, Nopember 2022

Pihak Pertama



HARLI AGUSTA, ST

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19750821 200212 1 005